



FOTO/IST

TERIMA DIPA - Bupati Sekadau Rupinus menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2020 yang diserahkan Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11).

Rupinus Minta SKPD Bekerja Lebih Baik

Terima DIPA dan Transfer Dana Desa

SEKADAU, TRIBUN - Bupati Sekadau Rupinus, menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2020 dari Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11).

Rupinus menyebut penyerahan DIPA bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di daerah dapat lebih baik.

"Penyerahan DIPA kepada setiap Pemerintah Daerah merupakan satu di antara kegiatan yang sangat penting, sekaligus berharap pelaksanaan kegiatan tahun 2020 nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan," jelasnya.

DIPA merupakan doku-

men acuan yang resmi ketika melakukan belanja daerah, di setiap Kabupaten.

Rupinus mengungkapkan secara umum DIPA Kabupaten Sekadau mengalami kenaikan terutama Dana Insentif Daerah (DID). Jika tahun 2018 Kabupaten Sekadau hanya memperoleh DID sebesar Rp 9 miliar, lalu di tahun 2020 mendapat sebesar Rp 50 miliar.

"Saya minta dinas yang mendapatkan anggaran supaya betul-betul menyiapkan perencanaan kegiatan. Perencanaannya mulai dipersiapkan dari sekarang, lakukan pengawasan maupun evaluasi," pinta Bupati.

Bupati juga meminta agar SKPD betul-betul menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

tahun 2020 secara efektif, efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sekadau.

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sekadau mendapatkan DID sebesar Rp 50 miliar.

"Kita bersyukur bahwa tahun 2020 kita mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 50 miliar," ucapnya.

Nominal tersebut tentu tidak semata-mata diterima oleh Pemkab Sekadau. Ada beberapa hal yang membuat Pemkab Sekadau mendapat DID tersebut.

Diantaranya laporan keuangan yang tepat waktu, penetapan APBD tepat waktu, Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyusunan anggaran dan perencanaan melalui aplikasi e-

budgeting dan e-planing.

Beberapa hal inilah yang menjadi satu diantara bahan pertimbangan dari pemerintah pusat hingga Pemkab Sekadau mendapat DID tersebut.

"Ini merupakan *reward* yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Sekadau atas laporan keuangan opini WTP yang diraih selama tujuh kali berturut-turut, penetapan APBD tepat waktu, laporan keuangan tepat waktu, penggunaan aplikasi e-budgeting dan e-planing," ujar Bupati.

Rupinus berharap agar anggaran ini betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan bagi masyarakat. (lan)